

Catatan Jurnal Perempuan

Melahirkan Generasi

Generasi adalah sandaran masa depan. Demi itulah kepemimpinan masa kini diadakan. Karena itu, krisis kepemimpinan adalah bahaya bagi masa depan. Dalam perspektif politik perempuan, tema ini menjadi makin serius karena konsep “masa depan” segera terkait dengan soal kualitas sebuah generasi.

Tema utama masa depan adalah keadilan. Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua pusat riset dunia sedang mengarahkan perhatian penuh pada soal ini. Dalam upaya itu kita menggali sumber-sumber konseptual untuk melayani generasi masa depan agar tumbuh dalam etika keadilan. Di sinilah etika feminis menyumbangkan perspektif.

Kepemimpinan adalah inisiatif. Yaitu kehendak untuk mengarahkan sumber daya politik ke tujuan keadilan. Kepemimpinan tumbuh dalam misi etis itu. Dan pada perempuan, misi itu paralel dengan seluruh pengalaman historisnya, yaitu ketidakadilan. Karena itu, bagi gerakan perempuan, politik adalah perjuangan keadilan dalam maknanya yang paling historis: menyelenggarakan kesetaraan. Makna ini tidak diperoleh dari sekedar halaman buku teori, tetapi langsung dari halaman hidup setiap hari: pada diskriminasi upah, pada diskriminasi jejang karier, pada diskriminasi pendidikan, pada diskriminasi kebudayaan, dst.

Jadi, dalam etika feminis, kehendak untuk memimpin bukanlah kehendak untuk mengakumulasi kekuasaan, melainkan untuk mendistribusikan keadilan. Para pembuat kebijakan paham bahwa malnutrisi pada anak-anak akan menyebabkan defisit pada kemampuan berpikirnya nanti. Tetapi perempuan hamil yang tidak memperoleh nutrisi (karena APBD disusun oleh politisi korup) lah yang akan menanggung akibatnya: ia harus merawat generasi yang “tidak ekonomis”, generasi yang akan “hilang” dalam kompetisi kepemimpinan.

Masalahnya kembali pada sistem nilai di balik prinsip imparialitas dari syarat-syarat kepemimpinan. Artinya, kendati daftar syarat itu ditetapkan sama pada individu, tetapi kultur institusi (birokrasi, korporasi) masih kuat memelihara stigma diskriminatif terhadap kepemimpinan

perempuan. Resiprokasinya kembali menghantui psikologi perempuan, bahwa ada batas yang diam-diam disetujui publik: kepemimpinan adalah wilayah utama laki-laki. Psikologi ini lalu menurunkan mistar ukur perempuan dalam mewujudkan cita-cita maksimalnya.

Sebaliknya, bila perempuan mampu melewati mistar ukur maksimal itu, stigmatisasi juga tetap menyertainya: “perempuan ambisius!”, dalam nada pejoratif.

Kultur tumbuh dalam ketidakadilan. Dan fasilitas peradaban justru mempertahankan struktur-struktur misoginis itu. Kita harus memahami tantangan kepemimpinan perempuan dalam ekosistem kebudayaan politik semacam itu. Parlemen, partai politik, birokrasi, universitas, pers, juga masih dalam wilayah pengaruh infrastruktur ini. Tetapi yang paling berbahaya adalah sikap pasif warga negara secara keseluruhan di dalam upaya memperbaiki kualitas kepemimpinan politik secara makro dan menyeluruh. Di sini kita berhadapan dengan energi negatif yang serba sinis pada keadaan, tetapi juga tidak ingin berpartisipasi untuk perubahan. Kepedulian pada kepentingan publik terus menurun, kendati akumulasi material individu membaik. Persoalannya jelas: kebencian pada politik telah merubah isu publik menjadi sekedar urusan “ad hoc” warga negara. Padahal justru karena sikap semacam inilah kita mengalami krisis kepemimpinan yang kronis. Perubahan haruslah dipahami dalam inisiatif total untuk keluar dari ekosistem diskriminatif itu. Dan itu berarti suatu upaya politik kewarganegaraan yang tidak sekedar “ad hoc”.

Di sinilah kita memperoleh inspirasi dari etika kepemimpinan feminis: merawat keadilan harus dalam visi menumbuhkan masa depan yang baru. Kepemimpinan adalah inisiatif sekaligus afirmasi pada kebaruan. Itulah artinya melahirkan generasi. (RGX)